

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Data Umum

a. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Bumbu

1) Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara $2^{\circ}52' - 3^{\circ}47'$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}15' - 116^{\circ}04'$ Bujur Timur Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara pulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru di sebelah utara timur. Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas wilayah sebesar 4.890,30 km² atau 13,03 persen dari total luas provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang mencakup 30,74 persen dari luas wilayah terkecil sebesar 114,64 Km² atau hanya 2,34 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu . berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Kusan Hulu adalah Mantewe, Satui, Kusan Hilir, Sungai Loban, Simpang Empat, Angsana, Batulicin, Karang Bintang dan Kuranji.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Tanah Bumbu



Sumber: website Tanah Bumbu

Secara geologi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai ketinggian di atas 100 meter sebesar 31,01 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga terhadap beberapa daerah yang merupakan dataran tinggi. Daerah dataran tinggi tersebut sebagian besar termasuk dalam barisan pegunungan meratus yang melintang dari utara ke arah barat daya wilayah Kalimantan selatan membentuk wilayah dataran tinggi diatas 100dpl (perbukitan) sekitar 31% wilayah kabupaten tanah bumbu. Wilayah lainnya yang merupakan dataran rendah dengan kemiringan lereng kurang dari 15% dan pesisir. Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potensi terdapatnya cebakan bahan mineral yang beraneka ragam baik jenis, kualitas dan kuantitasnya.

2) Wilayah Administrasi

Secara administrasi, Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dibagi menjadi 10 kecamatan, 144 desa, 5 kelurahan. Dengan ibukota Kabupaten Kecamatan

Batulicin. Kecamatan Kusan Hilir yang memiliki 34 desa dan 1 kelurahan, merupakan kecamatan yang memiliki desa paling banyak. Sebaliknya Kecamatan Kuranji hanya memiliki 7 desa.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Batulicin	7	2	127,71
2	Kusan Hilir	34	1	401,54
3	Sungai Loban	17	-	358,41
4	Satui	16	-	876,58
5	Kusan Hulu	21	-	1.609,39
6	Simpang Empat	10	2	302,32
7	Karang Bintang	11	-	302,32
8	Mantewe	13	-	1.011,21
9	Angsana	9	-	151,54
10	Kuranji	7	-	110,24
Jumlah	Tanah Bumbu	145	5	5.066,96

Sumber: BPS (2018)

3) Kondisi Demografis

Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017 sebesar 334.193 jiwa, naik sekitar 4,95% jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 269.581 jiwa. Apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki – laki sebesar 178.890 jiwa, naik sebesar 2,62% sedangkan perempuan sebesar 164.303 jiwa, naik sebesar 2,68% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Apabila dilihat dari kelompok umur, maka kelompok umur 5-9 tahun sebesar 39.001 jiwa mendominasi penduduk Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		2016	2017
1	Batulicin	17.797	21.330
2	Kusan Hilir	51.927	53.143
3	Sungai Loban	23.158	23.710
4	Satui	62.973	64.861
5	Kusan Hulu	21.553	22.033
6	Simpang Empat	86.094	88.638
7	Karang Bintang	19.617	20.108
8	Mantewe	20.790	21.284
9	Angsana	20.120	20.607
10	Kuranji	10.748	11.012
	Tanah Bumbu	334.313	343.193

sumber: BPS (2018)

4) Kondisi Sosial

a) Pendidikan

Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan selama tahun ajaran 2017, terdapat 206 buah sekolah TK 190 SD dan 14 unit Madrasah Ibtidaiyah. Pada tingkat SMP, jumlah sekolah mencapai 60 unit dan 24 unit Madrasah Tsanawiyah. Jumlah SMA, MA, dan SMK masing-masing 11 unit, 9 unit, dan 18 unit. Rasio murid-guru dan murid-sekolah merupakan indikator penting untuk mengukur daya tampung dan efektifitas proses belajar mengajar. Ketersediaan sarana fisik sekolah misalnya, menjadi semakin efektif kalau jumlahnya sepadan dengan daya tampung muridnya.

Demikian juga guru dan murid, proses belajar mengajar akan menjadi semakin terjamin kalau seorang guru tidak mengajar terlalu banyak murid. Di Kabupaten Tanah Bumbu, jumlah murid SD/MI tahun 2016/2017 mencapai 26.212 orang, sedangkan tenaga guru sebanyak 2.894 orang. Dengan ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan sertatenaga pendidik diharapkan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya terutama pada penduduk usia wajib sekolah 7-18 tahun untuk mengenyam pendidikan yang layak.

b) Kesehatan

Pada tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sebuah RSUD, di Kabupaten Tanah Bumbu tercatat 1 unit rumah sakit swasta, 1 rumah sakit bersalin, 30 unit rumah bersalin, 14 unit Puskesmas, 128 unit Poskesdes, 194 posyandu dan Balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017, Kabupaten Tanah Buambu memiliki 40 orang Dokter Umum, 10 orang Dokter Gigi. Selain itu juga terdapat 254 orang Perawat dan 294 orang Bidan.

c) Agama

Berdasarkan agama yang dianut, tahun2017 terdapat 96,00 persen penduduk Kabupaten Tanah Bumbu beragama Islam, dan selebihnya adalah Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan lainnya. Sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu antara lain 241 buah masjid, 500 buah langgar/musholla, 3 gereja dan 99 buah pura. (Sumber BPS KAB. Tanah Bumbu. 2018)

2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu

a. Visi dan Misi

Sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, visi menjelaskan arahatau suatu kondisi ideal dimasa

depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi BPPRD terwujudnya pelayanan prima pengelolaan pendapatan daerah yang professional, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari *stakeholders*, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu: “Mewujudkan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang Akuntabel”

Secara Filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui maknadi dalamnya yaitu:

- 1) Mewujudkan adalah suatu kegiatan atau aktivitas pelaksanaan tugas untuk mencapai atau mencita-citakan suatu keadaan yang nyata dapat dilihat dan dapat dirasakan.
- 2) Pengelolaan Pajak dan Retribusi adalah suatu kegiatan mengurus atau mengatur pendapatan yang di dapat Pajak maupun Retribusi oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Yang akuntabel diartikan harus mencapai sasaran, sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku, dapat dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan.

Visi diatas mengandung maksud ingin mencapai pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tepat sasaran, efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mudah dipahami, transparandan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sejalan dengan keadaan yang dicita-citakan dalam visi Kabupaten Tanah Bumbu yang ke tiga, yaitu Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang Produktif yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah

ditetapkan, oleh karena itu misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan.
- 2) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- 3) Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dengan profesionalisme dan transparan.
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan pendapatan daerah yang terarah, terkoordinasi, dan terkendali serta akuntabel.
- 5) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi.

Sebagai penjelasan dari misi tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah dan barang milik daerah meliputi:
 - a) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - 1) Meningkatkan Pajak Daerah
 - 2) Meningkatkan Retribusi Daerah
 - 3) Lain-lain PAD yang sah.
 - b) Meningkatkan kualitas dalam sebuah perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran yaitu pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang biasa disebut dengan (RKA). Sedangkan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yaitu diarahkan agar sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat.

- c) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Meliputi penata usahaan, pencatatan, akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan dan barang milik daerah, termasuk didalamnya juga pengamanan barang milik daerah.
- 2) Meningkatkan pelayanan publik, diartikan meningkatnya kualitas pelayanan kepada *stakeholders* baik berupa administratif, kenyamanan dan ketepatan waktu.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan retribusi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Pengelolaan pajak daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lai-lain yang sah.

3. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
- c) Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pendapatan dan peningkatan pendapatan.
- d) Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan

dibidang penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.

- e) Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan peraturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pembukuan, pelaporan dan pendapatan lain-lain.
- f) Melaksanakan koordinasikan dengan instansi yang terkait.
- g) Mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis.
- h) Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan.
- i) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional.
- j) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut;

1. Sekretariat
2. Bidang Pendapatan dan Peningkatan Pendapatan
3. Bidang Penetapan dan Penagihan
4. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pendapatan lain-lain
5. Unit Pelaksanaan Teknis dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Hasil Penelitian

1. Bagaimana pengaruh pesta pantai Mappanretasi Tradisi Maritim Suku Bugis Di Bumi Bersujud terhadap pendapatan asli daerah?

Menurut Dristato dan Anggraeni orang-orang yang datang pada tempat wisata (wisatawan) akan menimbulkan beberapa dampak, salah satunya dampak ekonomi. Dampak ekonomi tersebut meliputi dampak ekonomi langsung, dampak ekonomi tidak langsung, dan dampak ekonomi lanjutan.

- a. Dampak ekonomi langsung adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berupa pendapatan yang diterima oleh penerima awal pengeluaran wisatawan. Ketika pengunjung mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan permintaan terhadap produk dan jasa di tingkat lokal pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal yang bekerja di lokasi tersebut. Demikian juga dengan upaya pemerintah dalam melengkapi sarana dan prasarana di objek wisata, pada akhirnya bertujuan menciptakan pendapatan, kesempatan kerja, dan penerimaan pajak bagi wilayah tersebut. Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar umur 40 tahun sebagai Kasi Pengelolaan wisata dan kawasan strategis DISPORPAR menyatakan:

“Pesta pantai Mappanretasi di kelola Dinas Pariwisata selama 5 tahun, dan 2 tahun belakangan ini dana yang masuk langsung kebagian umum (PAD) dan perlengkapan, pesta pantai ini juga merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan setiap pada bulan april dan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, disana juga mengadakan Festival karnaval Budaya, yang diisi arakan gunung Kanrejawapute yang diadakan oleh DISPORPAR, dan arak-arakan pasangan pengantin. Acara ini dengan mengangkat etnis Budaya yang ada di Tanah Bumbu sebanyak kurang lebih 20 etnis Stand SKPD menurut pembagian etnis setiap hari selama satu bulan acara mappanretasi menampilkan pertunjukan dari beberapa etnis secara

bergantian, dan dihari puncak diadakan festival kuliner. Setiap tahunnya pengunjung/wisatawan semakin banyak namun, kami belum membuat data yang berupa file berapa jumlah/persen pengunjung tiap tahunnya kami hanya mengira-ngira saja setiap tahun diadakan pesta pantai untuk wisatawan yang datang dari beberapa yang saya sebutkan tadi itulah jelas pemerintah memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat lokal itu sendiri dan manfaat yang bisa dirasakan pemerintah pun dengan adanya pesta pantai ini sebagai ajang promosi untuk menambah kas pendapatan daerah”.

b. Dampak ekonomi tidak langsung

Adanya unit usaha di kawasan pantai pagatan pada acara pesta pantai Mappanretasi dapat membuka kesempatan kerja baru bagi penduduk lokal, walaupun unit usaha yang ada di kawasan wisata umumnya dikelola langsung oleh pemiliknya, namun pada waktu-waktu tertentu tetap membutuhkan tenaga kerja tambahan. Tenaga kerja yang dibutuhkan tergantung pada jumlah wisatawan dan kondisi musim. Beberapa unit usaha yang rutin memerlukan tenaga kerja adalah rumah makan, penginapan, dan penyewaan alat. Kesempatan kerja yang tercipta memberikan dampak yang sangat berarti pada penyerapan tenaga kerja lokal. Peningkatan jumlah wisatawan membuka kesempatan kerja paruh waktu. Namun, tidak semua masyarakat pada Pantai Pagatan memanfaatkan kesempatan peluang kerja yang telah diberikan pemerintah sebagaimana hasil wawancara dengan Irwan Hartani, S.P umur 45 tahun menjabat sebagai Kasubid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menyatakan:

“Pesta pantai Mappanretasi memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah, dari segi ekonomi memberikan peningkatan bahkan untuk pemerintah sendiri sebagai ajang promosi, namun pesta pantai juga memberikan dampak negatif untuk masyarakat yang tidak pandai mengelola kesempatan yang diberikan yaitu banyak dari pedagang yang di luar daerah yang berjualan sedangkan pemerintah Kabupaten Tanah Tumbu sangat berharap agar pedang yang berjualan dari Pagatan atau

pedagang yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu yang mendominasi dan memanfaatkan fasilitas yang telah di sediakan pemerintah”.

c. Dampak ekonomi lanjutan

Dampak ini merupakan dampak lanjut dari pendapatan yang diperoleh tenaga kerja lokal dari unit usaha tempat mereka bekerja. Dampak ini berasal dari pengeluaran sehari-hari tenaga kerja lokal. Pedagang tetap yang berjualan di pada acara pesta pantai Mappanretasi mereka merasa mendapat keuntungan dari adanya pesta pantai tersebut, meskipun ada pendatang/pedagang lain yang ikut berjualan mereka tidak merasa tersaingi. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang tetap Ibu Nurlina umur 44 tahun sebagai pedagang warung makan menyatakan:

“Berjualan pada saat pesta pantai Mappanretasi menurut saya sangat menguntungkan karena ketika saja membuka warung ini keuntungan sehari saya mendapatkan 1 juta – 4 juta perhari, dan saya tidak merasa terganggu atau tersaingi dengan pedagang lain, namun saya berharap tempat acara pesta pantai ini tetap di lapangan tidak pindah tempat lagi seperti tahun sebelumnya karena itu bisa menurunkan omset”.

Wawancara kedua bersama Ibu Rusma umur 45 tahun sebagai pedagang tetap berjualan minuman menyatakan:

“menurut saya berjualan pada saat acara pesta pantai Mappanretasi lebih menguntungkan saya dari pada hari-hari biasa, karena pada hari-hari biasa saya hanya mendapatkan keuntungan kurang lebih 50 ribu saja perhari, namun pada saat pesta pantai saya mendapatkan keuntungan sebesar 300 ribu dalam sehari. Namun saya tidak merasa tersaingi dengan adanya pendatang atau pedagang baru karena rezeki masing-masing sudah diatur, hanya saja harapan saya pengunjung maupun pedagang untuk lebih diatur agar lebih enak untuk pengunjung dan pedagang.

Secara umum dampak ekonomi secara langsung dari kegiatan wisata berkaitan erat dengan pengeluaran atau pengunjung (wisatawan), pada saat

wisatawan mengeluarkan sejumlah uang artinya mereka melakukan permintaan terhadap produk dan jasa di lokasi pesta pantai Mappanretasi yang akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal. Dampak ekonomi tidak langsung, upaya pembangunan sarana dan prasarana wisata pantai yang dilakukan oleh pengelola atau pemerintah yang mana pada akhirnya juga bertujuan untuk menciptakan pendapatan, lapangan pekerjaan, dan penerimaan pajak suatu wilayah. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Arief Hidayat umur 34 tahun sebagai Kepala Bidang Destinasi Pariwisata menyatakan:

“Dampak adanya pesta pantai ini memberikan dampak terhadap retribusi pendapatan, pemerintah menyediakan tenda/kios yang disewakan persatu tenda dengan harga Rp. 3.000.000= 2.000.000 masuk kas daerah + 1.000.000 untuk listrik dan lain-lain, kurang lebih 200 tenda kerucut yang disiapkan diperoleh 450.000.000 dari target 500.000.000 dari penjualan tenda, dari penjualan tenda yang didapat dari pemerintah, dan dari penjualan tenda langsung masuk kas pendapatan daerah. Pengolaan hasil pendapatan dari kegiatan pesta pantai pendapatannya langsung masuk kedalam kas daerah langsung dikelola daerah, dan untuk pembayaran pajak itu dikelola oleh BPRD. Kalau untuk retribusi misal dari bayar parkir, kebersihan, keamanan, dan sewa tenda dikelola oleh dinas-dinas terkait. Pesta pantai juga memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar yaitu memberikan lapangan pekerjaan dan juga berkontribusi pada pendapatan daerah”.

Menurut pemaparan Bapak Arif acara pesta pantai Mappanretasi memberikan dampak terhadap retribusi pendapatan daerah, berikut data laporan retribusi pendapatan daerah APBD Kabupaten Tanah Bumbu yang didapat oleh peneliti dari rancangan program investasi jangka menengah (RPIJM) tahun 2016 yaitu:

Tabel 2.1 Persentase Retribusi Pendapatan dari tahun 2014-2018

No.	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pelayanan Persampahan Kebersihan	36.307.000	48.221.000	69.655.000	66.011.000	92.061.000
2	Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	6.000.000	4.700.000	8.100.000	9.650.000	4.150.000
3	Retrebusi Pelayanan Pasar	53.044.874	49.101.758	106.406.225	75.663.017	96.213.018
Total		95.351.874	102.022.758	184.161.225	151.324.017	192.424.018
Persentase		13%	14%	25%	21%	27%

Sumber: Data diolah, Mirda, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya retribusi pendapatan mengalami kenaikan setiap tahunnya, retribusi pendapatan terdiri dari pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan retribusi pelayanan pasar (penyediaan tenda/tempat), pada tahun 2014 didapat dana sebesar Rp. 95.351.874 dengan persentase 13%, ditahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 14% dengan dana sebanyak Rp. 102.022.758 juta, disusul pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 25% dengan dana sebesar 184.161.225 juta, pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 21% dengan dana sebesar Rp. 151.324.017 juta, dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2018 yaitu 27% sebesar Rp. 192.424.018 juta.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosana Lina, S.IP umur 41 tahun Kasubid Pendapatan lain-lain Benda-Benda Berharga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menyatakan:

”Acara ini sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan dikenakannya pajak pada jasa parkir, kebersihan, sewa tenda, pajak hotel, hiburan, dan restoran memberikan keuntungan pada pendapatan asli daerah dan sekaligus ajang promosi untuk pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan apa yang sudah Ibu Rosana Lina nyatakan tersebut di atas sesuai dengan data yang sudah peneliti dapatkan, menurut data dari rancangan program investasi jangka menengah (RPIJM) tahun 2016 diperoleh data pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Persentase pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Ket	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pajak Hotel	126.734.233	139.396.558	96.269.923	112.753.622	131.719.296
2	Pajak Restoran	566.247.788	363.503.653	327.396.692	571.039.632	542.065.733
3	Pajak Hiburan	29.095.825	62.694.349	55.586.500	56.270.650	56.515.126
4	Pajak Reklame	31.287.617	44.568.668	25.041.342	56.727.989	89.896.445
Total		753.365.463	610.163.228	504.294.457	796.791.893	820.196.600
Persentase		22%	17%	14%	23%	24%

Sumber: Data diolah, Mirda, 2019

Berdasarkan tabel di atas pendapatan asli daerah pada acara pesta pantai Mappanretasi yang terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Mengalami kenaikan juga penurunan setiap tahunannya, di tahun 2018 mendapat dana sebanyak Rp. 820.196.600 juta dengan persentase sebesar 24%, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 23% dengan dana sebanyak Rp. 796.791.893 juta, pada tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar 22% dengan dana sebanyak Rp. 753.365.463 juta, bahkan ditahun 2015 mengalami penurunan sebesar 17% dengan dana sebanyak Rp.610.163.228 juta, dan terakhir pada tahun 2016 sebesar 14% dengan dana sebanyak Rp. 504.294.457 juta.

2. Bagaimana dampak *multiplier effect* (dampak berganda) pesta pantai Mappanretasi Tradisi Maritim Suku Bugis Di Bumi Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap masyarakat sekitar?

Pendapatan Masyarakat sekitar acara pesta pantai (*Mappanretasi*) sebelum adanya pesta Pantai ada yang bekerja sebagai petani, nelayan dan berbagai pekerjaan lainnya. Pada saat acara pesta pantai berlangsung masyarakat sekitar yang tadinya hanya bekerja sebagai nelayan atau petani memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk menambah penghasilan dengan berjualan baik makan, minuman atau lain sebagainya untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain para petani dan nelayan tadi para masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran juga memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyediakan lahan parkir dan wc umum agar memudahkan para wisatawan atau pengunjung untuk mencari parkir yang aman dan wc yang mudah, dengan di kenakan tarif perpengunjung yang telah di tentukan dan telah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan. Itulah dampak positif dengan diadakannya acara pesta pantai (*Mappanretasi*) terhadap masyarakat sekitar tempat berlangsungnya Acara tersebut.

Banyaknya wisatawan atau pengunjung yang berkunjung ke acara Pesta Pantai (*mappanretasi*) mengakibatkan peningkatan konsumsi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang. Selain dampak positif untuk masyarakat sekitar peneliti juga dapatkan beberapa keluhan yang diutarakan oleh beberapa orang wisatawan atau pengunjung yakni tentang banyak sampah yang berserakan di bibir pantai sehingga mengurangi keindahan alam dari pantai

pagatan hal ini dipicu sedikitnya tempat pembuangan sampah dan kurangnya petugas kebersihan, tak hanya itu kemacetan jalan dikarenakan masih ada wisatawan atau pengunjung yang berkunjung memarkir kendaraan roda empat di sembarang tempat padahal telah disediakan lahan parkir yang luas oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan masyarakat sekitar.

Menurut data yang didapat dilapangan dengan membagikan 30 kuesioner yang ada dengan menggabungkan rumus yang telah ada di teori sebelumnya

Clement menemukan rumusan sebagai berikut :

$$K = \frac{1}{\frac{1-\Delta C}{\Delta R}}$$

Untuk 5 Transaksi

K : adalah nilai ganda

C : adalah nilai konsumsi

R : adalah pendapatan

Δ : adalah perubahan tak terduga selama periode tertentu

$\frac{\Delta C}{\Delta R}$: adalah kecenderungan rata-rata berkonsumsi

$$K = \frac{1}{\frac{1-\Delta C}{\Delta R}} \quad K = \frac{1}{\frac{1-75.000}{1.883.383}} = 3,98$$

Dari perhitungan diatas maka di dapat nilai K (nilai ganda) adalah 3,98 yang di dapat dari nilai konsumsi rata-rata 75.000 dari wisatawan yang

berkunjung saat pesta pantai mappanretasi dan dari nilai pendapatan rata-rata 1.883.383 wisatawan. Artinya dengan adanya Pesta Pantai (*Mappanretasi*) mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar disebabkan pengeluaran pengunjung dari berbagai daerah yang dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana peningkatan pengeluaran dari pengunjung mengakibatkan peningkatan pada pendapatan masyarakat yang meliputi dampak langsung sedangkan dampak tidak langsung atau dampak lanjutan berupa pendapatan beberapa unit usaha, dan pengeluaran untuk konsumsi tingkat lokal.